

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil laporan, deskripsi dan pembahasan penelitian pada bab IV mengambil kesimpulan sesuai dengan data dan fakta yang diteliti. Maka pada bab V ini dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi sebagai pertimbangan dan masukan kepada pihak yang memerlukannya. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan deskripsi penelitian dan analisis hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi politik warga Desa Ambit masih rendah karena tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas dan tingkat pengetahuannya pun masih minim tentang politik, serta kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga kebanyakan warga belum mengetahui fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengakibatkan aspirasi warga tidak langsung ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melainkan ke Tokoh Masyarakat yang berada di wilayahnya, dan apabila tidak tersalurkan dan kebijakan pemerintah desa tidak sesuai dengan aspirasi warga, mereka melakukan aksi demo.

Kurang maksimalnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyalur aspirasi warga dan minimnya pengetahuan warga tentang peran

dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah faktor yang mengakibatkan warga kurang aktif untuk turut berpartisipasi politik khususnya dalam perumusan peraturan desa.

## **2. Kesimpulan Khusus**

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik warga Desa Ambit masih rendah karena tingkat SDMnya masih terbatas dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga banyak warga yang belum mengetahui tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga Desa Ambit adalah Tokoh Masyarakat yang berada diwilayahnya yang terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Pahing, Dusun Manis, Dusun Wage dan Dusun Kliwon. Tokoh Masyarakat lebih mempunyai kedekatan dengan warga sehingga warga lebih memilih mengeluarkan aspirasinya kepada Tokoh Masyarakat daripada langsung ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Bentuk-bentuk partisipasi warga bentuknya bermacam-macam yaitu dengan adanya swadaya masyarakat, mengikuti rapat desa, mengemukakan pendapat, dan mengadakan taraweh keliling yang dilaksanakan pada bulan ramadhan, dan dari berbagai bentuk partisipasi yang ada bentuk partisipasi yang paling sesuai adalah berpendapat, karena dengan berpendapat warga dapat mengeluarkan berbagai aspirasi terutama menyangkut perumusan peraturan desa.

4. Kendala-kendala yang ditemukan dalam partisipasi politik warga Desa Ambit adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan warga sehingga banyak warga yang belum mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dalam menyalurkan aspirasinya warga tidak langsung menyampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adanya keterbatasan SDM sehingga warga tidak begitu paham dan aktif untuk ikut berpartisipasi, akan tetapi sebagian warga yang memiliki wawasan yang cukup, mereka sudah memahami peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Dalam upaya mewujudkan partisipasi politik warga diperlukan sosialisasi untuk warga agar warga Desa Ambit mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mereka paham kepada siapa dapat menyalurkan aspirasinya. Dengan upaya tersebut diharapkan partisipasi politik warga akan lebih meningkat melalui adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama dalam perumusan peraturan desa.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan yang kiranya dapat menjadi masukan untuk meningkatkan partisipasi politik di Desa Ambit.

Pada bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti untuk tidak hanya mengamati sekaligus evaluator belaka, namun turut pula memberikan

masukannya berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang diberikan peneliti antara lain :

### **1. Kepada Kepala Desa Ambit**

- a) Meningkatkan pengetahuan dan disiplin sebagai pemimpin agar dapat dijadikan contoh oleh lembaga-lembaga terkait.
- b) Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga pemerintah agar setiap tugas yang dijalankan oleh lembaga tersebut dapat diawasi dengan baik oleh Kepala Desa.
- c) Agar mengadakan rapat koordinasi lebih intens lagi dengan lembaga-lembaga terkait agar keinginan dan kebutuhan masyarakat bisa lebih direalisasikan.
- d) Selalu mengawasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan peran dan fungsinya agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya kepada masyarakat.
- e) Bersikap terbuka dalam menampung dan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

### **2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

- a) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat

- b) Menjalin kerjasama yang lebih optimal dan saling berkoordinasi dengan Anggota BPD agar tugasnya sebagai wakil rakyat bisa maksimal menampung aspirasi masyarakat.
- c) Lebih membaur dengan masyarakat agar terjalin kedekatan dan kekerabatan dengan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat langsung tersalurkan.
- d) Membuat program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa seperti mengadakan musyawarah dengan masyarakat dalam ikut merumuskan peraturan desa, meningkatkan pengetahuan dengan studi banding ke BPD yang cara kerjanya paling bagus di Kabupaten Cirebon agar bisa meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang politik.
- e) Melaksanakan rapat sesuai dengan anggaran yang diadakan 20 X rapat dalam setahun dengan anggota BPD.

### **3. Kepada Perangkat Desa**

- a) Perangkat desa dalam mengoptimalkan kinerjanya harus dapat berkoordinasi dan memiliki kerjasama yang baik dengan kepala desa.
- b) Sebagai salah satu langkah dalam mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa, perangkat desa sebaiknya bisa meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah desa dan masyarakat, dengan cara terjun langsung di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah desa.

- c) Menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga terkait dan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi politik warga dalam perumusan peraturan desa.

#### **4. Kepada Tokoh Masyarakat**

- a) Tokoh Masyarakat dan BPD menjalin kerjasama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik.
- b) Agar dapat menjembatani setiap permasalahan masyarakat di wilayahnya apabila aspirasinya tidak tersalurkan.
- c) Memberikan motivasi kepada masyarakat yang ingin mengemukakan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa.

#### **5. Kepada Masyarakat Desa Ambit**

- a) Sebaiknya warga dapat menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan oleh desa.
- b) Masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan pemahaman politik, serta berusaha mencari informasi dari desa lain tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau melalui media cetak dan elektronik.
- c) Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan sikap gotong-royongnya, agar setiap pembangunan yang sedang berjalan bisa saling kerjasama dengan baik sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
- d) Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam perumusan peraturan desa dan kegiatan politik lainnya.